



Teori Progresivisme dalam Penerapannya Pada Kebijakan Administrasi Pelayanan Terpadu di Disdikpora Kab. Cianjur

Sri Handayani¹, Hendi S. Muhtar², Ruri Kusriani³,
Santi Irfianti⁴, Rahmat Setiawan⁵

Megister Administrasi Pendidikan, Universitas Islam Nusantara
Email: srihandayani@uninus.ac.id hendi@uninus.ac.id rurikusriani@uninus.ac.id
santiirfianti@uninus.ac.id rahmatsetiawan@uninus.ac.id

Abstract: *This research aims to explore the implementation of the Progressivism philosophy in its application to changes in Administrative Policy that occurred in the Cianjur Regency Education and Youth Department. So far, Progressivism Theory is usually used in learning, but in this research we take this theory from the perspective of advances in Information Technology as an impact on progress in the world of education. The question in this research is first How can the concept of adaptation and change in the theory of progressivism be applied in the planning and implementation of integrated service administration policies?. This research uses a qualitative approach with the case study method. Data collection techniques that we use are observations, interviews, and documentation. Data analysis done by using qualitative data analysis techniques. The results of the literature study in the field studies are shown as the results of the study. The result of the research shows that the concept of adaptation and change in the theory of progressivism can be applied in the planning and implementation of the integrated service administration policy of the disdikpora office in Cianjur Regency. The integrated service that has just been inaugurated in the month of November is a new and powerful new service / innovation in the education service of Disdikpora Kab. Cianjur.*

Key words: *Implementation of Progressivism philosophy, integrated services*

Abstrak: Implementasi filsafat Progresivisme dalam penerapannya pada perubahan kebijakan administrasi yang terjadi di disdikpora Kabupaten Cianjur. Selama ini Teori Progresivisme biasanya digunakan dalam pembelajaran, tetapi pada penelitian kali ini kami mengambil teori ini dari sudut pandang kemajuan Teknologi Informasi sebagai dampak dalam kemajuan di dunia pendidikan. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu *pertama* Bagaimana konsep adaptasi dan perubahan dalam teori progresivisme dapat diterapkan dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pelayanan terpadu? *Kedua* Bagaimana prinsip-prinsip dasar teori progresivisme dapat terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan terpadu? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang kami digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data hasil studi pustaka dan studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian yang selanjutnya data tersebut diinterpretasi untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep adaptasi dan perubahan dalam teori progresivisme dapat diterapkan dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pelayanan terpadu di disdikpora Kabupaten Cianjur, terbukti dengan perubahan kebijakan sistem pelayanan menjadi pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu yang baru diresmikan pada bulan november ini merupakan sebuah terobosan baru / inovasi dalam hal pelayanan pendidikan di Disdikpora Kab Cianjur

Kata Kunci: Implementasi filsafat Progresivisme, Pelayanan terpadu

Pendahuluan

Pendidikan sebagai pondasi utama dalam membangun generasi yang unggul, perlu kiranya kita sebagai pendidik harus mampu berprogres ke arah yang lebih baik. Hal ini seiring dengan Teori Progresivisme yang merupakan aliran filsafat modern yang menghendaki adanya pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Sistem Pendidikan senantiasa berakselerasi, bertransformasi dan berinovasi menuju Indonesia emas di tahun mendatang. Begitupun dengan Pelayan Pendidikan yang diterapkan di setiap lembaga atau instansi pendidikan yang



menerapkan sistem informasi demi kelancaran proses administrasi harus berjalan beriringan dengan kemajuan dalam sistem pendidikan. Begitu pula yang dilakukan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur yang tidak bisa dipisahkan dengan sistem Pendidikan, yang harus senantiasa berprogres demi kelancaran proses transformasi pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Pelayanan terpadu yang baru diresmikan pada bulan november ini merupakan sebuah terobosan baru / inovasi dalam hal pelayanan pendidikan di Disdikpora Kab Cianjur, hal ini sebagai upaya untuk memudahkan para pengunjung atau tamu baik dari kalangan Pendidik maupun bukan Pendidik dalam mengurus administrasi siswa atau guru dalam memenuhi berkas-berkas yang perlu disiapkan. Sejauh ini Teori Progresivisme biasanya diterapkan pada proses pembelajaran, sehingga masih belum banyak yang mengangkat dalam hal pelayanan terpadu pada kebijakan administrasi pendidikan. Inilah yang melatarbelakangi kami untuk lebih menggali sejauh mana teori progresivisme ini dapat diterapkan terhadap pelayanan terpadu yang dilakukan di lingkungan disdikpora Kabupaten Cianjur. Kami berharap dari mini riset ini, dapat memberikan penguatan pada pelayanan terpadu yang diterapkan oleh Disdikpora Cianjur ini untuk menjadi lebih baik dan dapat menjadi contoh untuk instansi yang lain, baik dalam skop yang kecil misalnya di tingkat Satuan Pendidikan bahkan untuk yang skop yang lebih besar.

Kajian Teori

Pemaparan dalam penelitian ini berhubungan dengan konsep konsep utama diantaranya yaitu *Pertama*, konsep filsafat Progresivisme yang merupakan sebuah aliran filsafat pendidikan yang berkembang di awal abad ke 20, dan mempunyai pengaruh sangat besar dalam dunia pendidikan terutama di Amerika Serikat. Teori progresivisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Filsafat pendidikan ini melihat peserta didik adalah manusia yang memiliki berbagai kemampuan-kemampuan yang potensial dan harus dikembangkan melalui cara-cara yang kreatif dan inovatif. Beberapa pandangan dan konsep teori progresivisme menurut para ahli melibatkan pemikiran tentang perkembangan kognitif anak, pengalaman belajar yang bermakna, dan peran guru sebagai fasilitator karena pada dasarnya manusia sejak lahir sudah membawa kemampuan atau potensi dasar untuk dapat mengatasi segala problematika yang terjadi di hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Seomanto (dalam Jalaludin & Idi, 2012: 89) menyatakan bahwa daya akal sama dengan inteligensi, inteligensi ini menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang dikenal atau dalam pemecahan masalah. Di sisi lain progresivisme merupakan penggerak manusia dalam usahanya untuk mengalami kemajuan atau sering disebut dengan progress (Barnadib, 1994: 28).

Progresivisme merupakan suatu kemampuan bergerak ke arah perbaikan yang kemudian memiliki tujuan jelas ke depan dalam rangka menjadi manusia yang dinamis dan kreatif, memiliki wawasan berfikir luas, serta memiliki keleluasaan dalam mengeksplor dirinya tanpa adanya tekanan dari orang lain. Sejalan dengan hal itu, Dewey mengemukakan pendidikan lebih mengarah kepada suatu konsep yang harus dikembangkan, sehingga pandangan progresivisme pendidikan menghendaki adanya asas fleksibilitas untuk memajukan pendidikan, dan pendidikan semestinya bersifat demokratis. Oleh karena itu progresivisme tidak menyetujui pendidikan yang bersifat otoriter, karena pendidikan yang otoriter akan



mematikan potensi peserta didik untuk hidup sebagai manusia yang senang dalam menghadapi pelajaran.

Menurut John Dewey progresivisme merupakan sebuah aliran filsafat yang berorientasi ke depan yang memposisikan manusia sebagai salah satu subjek pendidikan yang memiliki bekal dan potensi dalam pengembangan dirinya dan memiliki kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi. Selain itu, John Dewey juga memandang bahwa sekolah merupakan lingkungan masyarakat yang kecil, dimana hal itu merupakan cerminan daripada sekolah tersebut. Artinya, ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian dalam pengelolaan sekolah terhadap masyarakat. Setidaknya sekolah bukan hanya sebagai sebuah “menara gading” yang menjulang jauh di atas masyarakat. Semestinya sekolah dan masyarakat saling berinteraksi secara positif. Pandangan tersebut perlu di pegang teguh disertai dengan harapan untuk mewujudkannya. Meskipun pada realisasinya bukan semata-mata hasil dari terjemahan harfiah (Barnadib, 1994: 61-62). Disisi lain progresivisme merupakan sebuah terjemahan dalam hal pendidikan yang dihubungkan dengan adanya orientasi pada tahap awal munculnya masyarakat berteknologi di Amerika (Barnadib, 1994: 80).

Kedua, Kebijakan administrasi merujuk pada serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks administrasi publik atau organisasi. beberapa definisi kebijakan administrasi menurut para ahli, George E. Berkley menyatakan bahwa kebijakan administrasi dapat dianggap sebagai suatu rencana yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam administrasi publik. Begitupun dengan Frank Marini berpendapat bahwa Kebijakan administrasi adalah suatu pernyataan atau arah yang memberikan pedoman untuk tindakan dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi atau unit administrasi. Menurut Paul H. Appleby kebijakan administrasi melibatkan keputusan yang diambil oleh pejabat atau pemimpin pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dapat merinci keputusan tentang alokasi sumber daya dan metode pelaksanaan.

Ketiga, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya mencapai good governance/tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama adalah pemberian pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu tempat dan dikontrol dengan sistem pengendalian manajemen. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah kegiatan penyelenggaraan jasa perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan izin dokumen, dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan petugas front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi yang seringkali terjadi dalam proses pelayanan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEO.M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai uapaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Menurut Saefullah pelayanan umum (*public service*) adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum yang menjadi warga negara atau yang secara sah menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Sementara pelayanan umum menurut Lukman adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Soebijanto Menyebutkan pelayanan umum adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah mengurus hal-hal yang diperlukan khalayak ramai. Hal tersebut meliputi masalah-masalah perizinan, keamanan, kebersihan dan kebutuhan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Keempat, Perubahan sistem pelayanan administrasi di kantor disdikora kabupaten Cianjur sangat relevan dengan teori-teori filsafat progresivisme, dimana filsafat progresivisme menghendaki pengembangan dari pengalaman sebelumnya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Hal tersebut sejalan dengan latar belakang dilakukannya perubahan pelayanan di kantor disdikora kabupaten Cianjur, karena perubahan ini berdasarkan hasil dari refleksi yang dilakukan terhadap sistem pelayanan yang telah berjalan yang dinilai kurang efektif dan efisien. Progresivisme memiliki konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar untuk menghadapi dan mengatasi masalah. Salah satu tujuan pelayanan terpadu satu atau yaitu memperpendek prosedur, akses yang lebih luas menjadi salah satu dasar relevansi filsafat progresivisme dengan kebijakan administrasi pelayanan terpadu satu pintu.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif dilakukan karena peneliti tidak bermaksud menguji ataupun membandingkan suatu teori tetapi peneliti ingin menggambarkan atau mendeskripsikan atau melukiskan secara sistematis mengenai suatu konsep adaptasi dan perubahan dalam suatu kebijakan. Penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan sebuah data, akan tetapi deskripsi tersebut merupakan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan baik melalui wawancara mendalam, observasi ataupun dokumentasi. Observasi dilakukan selama kunjungan ke tempat penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian lapangan.

Penelitian ini akan berfokus di kantor Disdikpora Kab Cianjur sebagai tempat studi kasus Teori Progresivisme dalam penerapannya pada Kebijakan Administrasi (Pelayanan Terpadu). Dalam penelitian ini, kami akan melihat bagaimana konsep adaptasi dan perubahan dalam teori progresivisme dapat diterapkan dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan administrasi pelayanan terpadu di kantor disdikpora kabupaten Cianjur serta Bagaimana prinsip-prinsip dasar teori progresivisme dapat terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan terpadu.



Populasi penelitian ini terdiri dari staf yang ada di kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur, serta nasabah atau pengguna layanan terpadu di disdikpora Kabupaten Cianjur baik dari kalangan pendidik maupun non pendidik.

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural. Informan utama yang terlibat dalam penerapan Pelayanan Terpadu akan menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Salah satunya adalah Kasubag Tata Usaha yaitu Bapak Rana Rusmana. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi. Dokumen hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen lainnya. Validitas internal akan ditingkatkan dengan triangulasi data, yaitu penggunaan berbagai teknik pengumpulan data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 pasal 14 Tahun 2021 juga disebutkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur juga mempunyai Misi Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kepemudaan, olahraga, kesehatan dan ekonomi dengan tujuan Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata yang sarasannya yaitu agar dapat Meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, Meningkatnya akses layanan Pendidikan Dasar, Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan, Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga dan pemuda serta pengawasan dan pengendalian.

Arah Kebijakannya yaitu Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan Mutu, Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru serta akselerasi peningkatan kualifikasi guru, Berdaya Saing dalam Bidang Keolahragaan dan Kepemudaan. Adapun yang menjadi motto pelayanan disdikpora cianjur adalah CERMAT (Cepat, Ramah, Mudah, Akuntabel dan Transparan). Layanan pelayanan terpadu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur Sesuai Dasar Hukum Standar Pelayanan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur. Nomor: 421/419b/Disdikpora/Kab/2022 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, jenis-jenis layanan yang dapat dipergunakan di kantor disdikpora Kabupaten Cianjur yaitu Mutasi Siswa, Mutasi Pegawai, Dapodik, NPSN, Pengesahan KTSP, Rekomendasi Mutasi Guru, BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan), Sertifikat Pendidik, Rekomendasi ijin Operasional Satuan pendidikan, Lembaga Pendidikan (Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal), Ijin Pemakaian/Peminjaman Gedung Olahraga, Ijin Hibah/Bansos, Kegiatan kepemudaan dan Olahraga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengumpulan data, diketahui bahwa terjadi perubahan yang signifikan dari sistem layanan di kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur. Pelayanan terpadu merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Disdikpora Kabupaten Cianjur terkait dengan sistem pelayanannya terhadap Pengguna/nasabah dengan tujuan untuk memberi



kemudahan pada masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Disdikpora Kabupaten Cianjur yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan yang dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan terpadu merupakan sebuah inovasi dari pemerintah dalam rangka peningkatan layanan publik, memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya menciptakan good governance yang baik. Masyarakat sebagai Pengguna layanan tidak perlu bingung ruangan mana yang mengurus administrasi yang dibutuhkan, karena di depan gedung disdikpora sudah ada front office dan masing-masing layanan sudah ada dalam satu meja dan satu ruangan. Pelayanan Terpadu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur diresmikan ada hari Jum'at, 27 Oktober 2023 oleh bapak Bupati Cianjur H. Herman Suherman. Peresmian kantor pelayanan terpadu usai memimpin apel pagi yang diikuti oleh para Guru, Kepala Sekolah, dan para ASN dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten Cianjur.

Sebelum diresmikannya pelayanan terpadu satu pintu, nasabah ataupun pengguna jasa layanan yang ada di kantor disdikpora kabupaten cianjur harus menyerahkan sendiri berkas yang ia bawa ke ruangan -ruangan yang sesuai dengan pengajuan yang dituju. Banyaknya ruangan yang ada di kantor disdikora kabupaten cianjur tak jarang membuat pengunjung kebingungan. Namun setelah diresmikannya pelayanan terpadu satu pintu, sangat memudahkan pengunjung. Perubahan sistem pelayanan ini dilakukan berdasarkan hasil dari pengalaman, refleksi yang telah dilakukan dari sistem pelayanan sebelumnya. Mekanisme pelayanan yang sebelumnya dilakukan oleh Disdikpora Kabupaten Cianjur dinilai kurang efisien dalam mengatasi berbagai pengaduan dari warga maupun aktivitas pendidikan. Sistem Layanan Terpadu memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai alat untuk memudahkan pelayanan yaitu dengan adanya Media sosial berupa situs resmi dan Instagram, sehingga masyarakat pendidik tahu apa saja pelayanan dan dapat mempersiapkan berkas atau persyaratan yang dibutuhkan untuk melengkapinya. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam efektivitas pelayanan.

Perubahan ini dilandasi oleh Setelah mengimplementasikan konsep-konsep filsafat progresivisme. Penerapan ini tercermin dalam berbagai aspek, seperti melakukan sebuah perubahan karena menghendaki suatu kemajuan sebagai suatu tindakan menuju perbaikan. Filsafat progresivisme menghendaki rekonstruksi pengetahuan yang terus menerus sehingga terjadinya perbaikan dari hasil proses fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan interaksi dan pengalaman yang terakumulasi. Progresivisme menghendaki adanya kemajuan dalam bidang pendidikan, melalui adaptasi terhadap realitas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tidak dapat kita hindari. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur merubah sistem pelayanannya dari sistem pelayanan parsial pada tiap-tiap layanan, menjadi sistem pelayanan terpadu satu pintu. Melalui filsafat progresivisme menjadi bentuk aktualisasi Disdikpora Kabupaten Cianjur sebagai respons untuk menjawab berbagai kebutuhan dan masalah pada era modern ini agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Penerapan aliran filsafat Progresifisme dalam dunia pendidikan khususnya administrasi pendidikan di kantor Disdikpora Kabupaten Cianjur membawa perubahan dan kemajuan dalam bentuk layanan menjadi lebih baik sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Adapun dampak dari pelayanan terpadu ini sangat dirasakan baik oleh pihak Internal maupun Eksternal. Dari pihak Internal yaitu staf / pegawai dengan adanya pelayanan terpadu ini menjadi lebih efektif dan efisien, staf yang sudah ditugaskan tahu apa yang menjadi tugasnya



yaitu menerima berkas persyaratan kemudian input data dan memprosesnya. Dan pihak Ekternal yaitu pengguna layanan juga ikut merasakannya karena dengan pelayanan yang disatu mejakan ini sangat memudahkan, pengguna tahu kemana harus melengkapi berkas sesuai kebutuhan layanan. Selain itu juga di ruangan layanan pengguna disediakan fasilitas seperti buku-buku bacaan, tempat duduk yang nyaman, bahkan jika ada pengguna/pengunjung yang membawa anak kecil terdapat space / tempat untuk bermain anak, hal ini dimaksudkan agar pengunjung nyaman ketika menunggu antrian. Itulah fasilitas yang disediakan disdikpora dalam rangka memberikan kenyamanan pengunjung.

Hambatan yang terjadi tidak terlalu muncul dalam pengimplementasian pelayanan satu pintu di kantor disdikpora kab cianjur ini, hanya saja terkadang nasabah yang tadinya hanya ingin menyelesaikan satu permasalahan, mereka jadi berkonsultasi tentang masalah lainnya yang menyebabkan waktu konsultasi menjadi lebih lama. baik itu secara teknis maupun SDM Disdikpora kab cianjur tidak mengalami hambatan, namun dalam hal sarana disdikpora kabupaten cianjur belum mempunyai aplikasi yang bisa mempermudah layanan tersebut dan itu akan menjadi PR kedepannya yang akan dilakukan kantor disdikpora kab cianjur untuk menuju perbaikan.

Kesimpulan

Sebagai bentuk aktualisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman, dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur melakukan perubahan kebijakan administrasi yang pada awalnya dilaksanakan secara parsial pada tiap-tiap sub pelayanan, kini dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Perubahan sistem pelayanan ini sesuai dengan teori filsafat Progresivisme yang menekankan pada kemajuan atau progres seorang individu dalam belajar sebagai upaya untuk menghadapi perubahan di masa yang akan datang. Filsafat progresivisme menghendaki adanya kemajuan dalam bidang pendidikan apalagi di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Filsafat progresivisme menghendaki rekonstruksi pengetahuan yang terus menerus sehingga terjadinya perbaikan dari hasil proses fakta, hukum, prinsip, proses, dan kebiasaan interaksi dan pengalaman yang terakumulasi. Perubahan sistem kebijakan administrasi pelayanan terpadu satu pintu ini dirasakan membuat pengelolaan arsip dan dokumen di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menjadi lebih tertib dan terarah, hal tersebut juga mencegah terjadinya kebocoran data kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya. Juga mencegah terjadinya kolusi dan nepotisme. Selain oleh pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), perubahan kebijakan ini juga dirasakan oleh para pengguna layanan di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Perubahan tersebut mempermudah para pengguna layanan disdikpora kabupaten cianjur, karena semua pelayanan dapat di akses di front office tanpa harus mencari sendiri ruangan-ruangan pelayanan seperti dulu sebelum diresmikannya pelayanan terpadu satu pintu ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengguna, kami mengambil kesimpulan bahwa perubahan pelayanan ini sangat memudahkan mereka untuk mengurus kepentingan mereka di kantor Disdikpora ini.

Para Pengguna layanan tidak perlu bingung, Mereka tidak harus susah-susah mencari dimana ruangan layanan yang akan mereka tuju, sekarang mereka cukup mendatangi front office dan langsung disambut dengan para staf Disdikpora yang siap membantu segala permasalahan ataupun ajuan mereka. Para pengguna layanan juga dimudahkan dengan adanya website



disdikpora dan instagram disdikpora yang dapat dengan mudah di akses oleh siapa saja yang memerlukan, serta menyediakan *call centre*. Selain dampak positif yang dirasakan, perubahan kebijakan ini pastilah tidak lepas dari hambatan-hambatan. Namun hambatan yang nampak tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya. Baik itu secara teknis maupun SDM Disdikpora kabupaten Cianjur tidak mengalami hambatan, namun dalam hal sarana harusnya disdikpora kabupaten cianjur mempunyai aplikasi yang bisa mempermudah layanan tersebut dan itu akan menjadi PR kedepannya yang akan dilakukan kantor disdikpora kabupaten Cianjur untuk perbaikan.

Penelitian ini memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep adaptasi dan perubahan dalam teori progresivisme yang ternyata dapat diterapkan tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran saja tetapi dapat di implementasikan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pelayanan. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemangku kebijakan pendidikan di tingkat nasional terutama dalam konteks kebijakan administrasi supaya lebih bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman sehingga pelayanan menjadi lebih optimal.

Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah:

- Bogdan, R. C. dan Biklen, S. K. (2007). *Penelitian Kualitatif untuk Pendidikan Suatu Pengantar Teori dan Metode*. Boston: Edisi ke-5, Allyn & Bacon.
- Iman, Muis Sad. 2004. *Pendidikan Partisipatif. Menimbang Konsep Fitrah Dan Progressivisme John Dewey*. Cetakan Pertama. Yogyakarta; Safiria Insani Press.
- Salu, Vega ricky dan Triyanto, *Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Implikasinya dalam pendidikan Seni di Indonesia" Volume 11 (2017) Jurnal Imajenasi* (Tanggal diakses 10 November 2023)
- Wulandari, Tria "Teori Progresivisme John Dewey dan Pendidikan Partisipatif dalam Pendidikan Islam" Volume 5 (2020) *Jurnal Kajian Kependidikan Islam* (Tanggal diakses 10 Neovember 2023)

Buku:

- Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2002)
- Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan: Sistem & Metode*, cet. 9 (Yogyakarta: ANDI, 1997).
- John Dewey. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Singapura: Sage Publications.
- Muhammad Nurul Wathoni, *Filsafat Pendidikan Islam Analisis Pemikiran Filosofis Kurikulum 2013* (Ponorogo: CV. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif* (Yogyakarta: Safiria Insania Press & MSI UII, 2004).
- Muslich, M. (2007). *KTSP: Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual. Panduan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas*. Jakarta: Bumi Aksara.

Website :

- Situs resmi Disdikpora Kabupaten Cianjur <https://disdikpora.cianjurkab.go.id/>
- Universitas Islam An Nur Lampung. (2023). *Kelebihan dan Kelemahan Kurikulum Merdeka*. Diakses dari alamat <https://an-nur.ac.id/blog/kelebihan-dan-kelemahan-kurikulum-merdeka.html>.